

TAJUK RENCANA

Tanggap Darurat Diperpanjang

PEMDA DIY kembali memperpanjang status tanggap darurat, yang semula akan berakhir 30 Juni 2020 menjadi 31 Juli 2020. Perpanjangan status tersebut dimaksud untuk lebih mempersiapkan diri menghadapi tahapan *new normal* (kenormalan baru). Sejauh ini, perilaku masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dinilai masih perlu ditingkatkan lagi.

Demikian diungkapkan Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 DIY, Biwara Yuswantana di Gedhong Pracimosono Kompleks Kepatihan, Kamis (25/6) lalu. Pernyataan tersebut harus mendapat perhatian berbagai pihak, agar kondisi normal baru benar-benar segera terwujud.

Sementara itu Juru Bicara Nasional Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto menyebutkan adanya masyarakat yang tidak menjaga jarak dan tidak mengenakan masker menjadi faktor utama penularan Covid-19 masih terjadi. Kondisi ini tentu akan menjadi hambatan besar untuk mewujudkan era normal baru.

Yurianto juga mengumumkan, berdasarkan analisis sejumlah indikator, saat ini ada 188 wilayah administrasi (kabupaten/kota) di Indonesia yang sudah berisiko rendah terhadap penyebaran Covid-19. Dari jumlah tersebut, lima wilayah di DIY, yakni Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulonprogo, Bantul, Sleman dan Gunungkidul, masuk berisiko rendah.

Bisa dibandingkan dengan Jawa Tengah yang terdiri dari 35 kabupaten kota, saat ini yang masuk wilayah

berisiko rendah Covid-19 adalah Kabupaten Banjarnegara, Batang, Kota Surakarta dan Kota Tegal, Kabupaten Karanganyar, Temanggung, Pemalang, Tegal, Kebumen, Sukoharjo, Grobogan, Banyumas, Boyolali, Pati, Brebes, Sragen, Purbalingga, Purworejo, Wonosobo, Cilacap, dan Klaten.

Kalau dicermati, euforia masyarakat yang berlebihan menjadi salah satu faktor penghambat pengendalian penyebaran virus Corona di berbagai daerah. Sebagian masyarakat yang punya uang, antara lain 'melampiasikan' euforia dengan membeli sepeda. Sementara masyarakat yang benar-benar terdampak Covid-19 hanya bisa pasrah sambil 'tiarap' menunggu kondisi normal baru.

Menurut Biwara Yuswantana yang juga Kepala Pelaksana BPBD DIY, jika kehidupan normal baru tidak bisa segera diterapkan dalam waktu dekat, berbagai sektor seperti ekonomi, sosial, pariwisata, dan pendidikan akan sulit untuk bangkit. Saat ini tim verifikasi dari berbagai sektor juga melakukan evaluasi verifikasi di beberapa hotel, pusat perbelanjaan dan objek wisata, sebagai salah satu langkah persiapan menuju normal baru.

Untuk mewujudkan kondisi normal baru di DIY, khususnya, memang diperlukan kesadaran dan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Semoga warga yang telah terjebak euforia berlebihan segera menyadari, bahwa masih ada warga lain yang saat ini masih 'tiarap' karena terdampak Covid-19. □

'WfH', Tatanan Konsistensi Kebijakan

DIKELUARKANNYA Keputusan Bersama Empat Menteri berupa Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), sudah pasti melegakan dan mencerahkan berbagai pihak. Panduan dimaksud seakan menjadi jawaban atas berbagai pertanyaan yang muncul di khalayak publik, apakah pembukaan sekolah akan tetap 'dipaksakan' oleh sejumlah kepala daerah. Ataukah ada 'relaksasi' dalam implementasi di berbagai daerah.

Panduan tersebut sesungguhnya masih berupa Norma, Standar, Peraturan dan Kriteria yang menjadi domain kewenangan pemerintah pusat. Panduan tersebut menggariskan: (1) pola pembelajaran, (2) proses pengambilan keputusan dimulainya pembelajaran tatap muka untuk peserta didik; (3) Tahapan pembelajaran; (4) ketentuan pembelajaran tatap muka; (5) Kewajiban kepala satuan pendidikan; (6) fase pembelajaran tatap muka; dan (7) pembiayaan pembelajaran dengan memanfaatkan dana BOS.

Tantangan

Panduan yang ditetapkan merupakan suatu kebijakan yang berkualitas, konsisten, koheren, dan rasional. Yang harus dilakukan pemerintah daerah yaitu menjabarkan panduan tersebut secara operasional sesuai kondisi wilayah masing-masing. Yang diharapkan publik adalah konsistensi (keajegan) kebijakan, yang berbasis rasionalitas. Bukan kehelek-emosional sejumlah kepala daerah.

Untuk menjaga konsistensi kebijakan yang mengatasnamakan empat kementerian maka daerah, harus mampu menjawab dua pertanyaan kunci. Pertama, apakah daerah sudah memiliki 'peta kebutuhan' pendidikan di daerahnya? 'Peta kebutuhan' antara lain terkait dengan: (1) berapa banyak satuan pendidikan atau sekolah yang sudah memiliki infrastruktur terhadap internet? Dan (2) berapa banyak satuan pendidikan yang sudah mampu mengadakan alat-alat atau sarana kesehatan sesuai dengan protokol

Hendarman

kesehatan? Pertanyaan kunci kedua adalah apakah daerah sudah memiliki 'peta kolaborasi' dengan ekosistem pendidikan di daerahnya? 'Peta kolaborasi' ini akan sangat penting untuk memperoleh dukungan dan keyakinan dari para orang tua. Mengapa demikian?



KR-JOKO SANTOSO

Mengutamakan Kesehatan

Sebagaimana diatur dalam panduan sebagai bagian dari Keputusan Bersama Empat Menteri itu, orang tua memiliki hak untuk dapat menolak pembukaan pembelajaran tatap muka. Hak orang tua tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengambilan keputusan dimulainya pembelajaran tatap muka. Dialog dengan orang tua menjadi suatu keniscayaan. Tidak sekadar meminta kesediaan mendampingi anak-anaknya belajar. Tetapi juga memastikan bahwa anak-anak mengalami perasaan nyaman dan termotivasi belajar di rumah. Apabila diperlukan, pihak sekolah menggelontorkan bantuan paket pulsa bagi siswa yang memerlukan dengan menggunakan kebijakan 'relaksasi' dana BOS.

Kepala daerah, kepala dinas, dan kepala satuan pendidikan harus bersinergi

dan memastikan bahwa satuan pendidikan telah memenuhi protokol kesehatan. Penentu kebijakan suka atau tidak suka harus mengedepankan prinsip 'kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat'.

Keputusan bersama secara tegas menutup kemungkinan adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas dorongan emosional dan kesewenangan pihak-pihak yang terkait baik pada tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Untuk memulai pengambilan keputusan pembelajaran tatap-muka, pimpinan daerah harus berkonsultasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di masing-masing daerah.

Pengambilan keputusan di daerah dan akhirnya pada satuan pendidikan seyogianya tidak didasarkan atas asumsi ketercapaian kinerja dari masing-masing kepala daerah pada masa pandemi Covid-19 ini. Jumlah satuan pendidikan atau sekolah yang dibuka, seyogianya tidak dijadikan indikator keberhasilan dalam menangani pandemi Covid-19 di daerahnya. Kehati-hatian dari masing-masing pemangku kepentingan di masing-masing daerah, terutama kebijakan dan kearifan pimpinan daerah menjadi kunci pertama. Terutama untuk memastikan bahwa pembelajaran tatap-muka di satuan pendidikan tidak menimbulkan korban baru terparap pandemi Covid-19. Apabila muncul korban terparap baru yang dapat mengubah status zona, maka otomatis satuan pendidikan yang sudah dibuka harus ditutup kembali.

**) Hendarman PhD, Kepala Pusat Penguatan Karakter, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)*

Syarat Menulis Opini

Para penulis yang terhormat, Redaksi hanya akan memperhatikan tulisan artikel/opini yang dikirim ke opini@kr.com dengan disertai CV dan copy identitas diri. Panjang tulisan sekitar 3.700 karakter atau 600 kata. Demi kelancaran bersama, tidak melayani pengiriman ke akun pribadi. Terimakasih

Pikiran Pembaca

Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margu Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email pikiranpembaca@gmail.com. Naskah ditanggapi fotokopi atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis.

Mendampingi dengan Hati

ORANGTUA adalah orang pertama yang harus tahu tentang semua masalah yang dihadapi anak. Menggali informasi tentang berbagai hal yang dialami dan dirasakan anak pada saat anak mengikuti setiap rangkaian kegiatan belajar dan evaluasi sangat penting untuk dilakukan orangtua. Bagi anak yang mendapatkan deskripsi rapor dengan kualifikasi baik, sangat mudah bagi orangtua untuk memotivasi dan mengkomunikasikannya. Tapi jika sebaliknya, maka para orangtua harus lebih hati-hati, arif dan bijak dalam bersikap maupun memberikan komentar.

Masih banyak orangtua yang terfokus pada hasil rapor yang berupa angka dan mengabaikan deskripsinya. Deskripsi rapor dituliskan dalam narasi sangat baik, baik, cukup dan kurang diikuti indikator capaian pengetahuan, keterampilan ataupun sikap yang diukur. Dari deskripsi rapor itulah mestinya menjadi awal komunikasi antara orangtua dan anak tentang apa dan bagaimana kesiapan yang telah dilakukan selama ini, baik pada pembelajaran di luar jejaring (luring) ataupun pada saat dalam jejaring (daring) akibat pandemi.

Beberapa anak yang mendapatkan hasil kurang menggembirakan, tentu ia dalam kondisi psikis yang lemah dan butuh penguatan utamanya dari orangtua. Tanpa disadari sering orangtua mengekspresikan kekecewaan dan menghakimi anak dengan kata-kata, bahkan dengan perlakuan kasar yang dapat menyakiti anak baik psikis maupun fisik. Ketidakhati-hatian orangtua seperti inilah yang dapat membuat buntunya pikiran dan motivasi anak untuk mengungkapkan apa yang sesungguhnya terjadi, sehingga

membuat anak frustrasi dan lari ke hal-hal yang tidak diinginkan.

Dimulai dengan menanyakan apa dan berapa target yang sebenarnya diinginkan anak serta apa yang sudah dilakukannya selama ini, adalah awal pertanyaan mendasar untuk menggali informasi tentang masalah terjadi. Angka dan deskripsi pada raport adalah hasil dari apa yang sudah dilakukan untuk dievaluasi bersama tentang kekurangan, kelebihan dan kelemahannya serta disepakati tentang pengaruhnya. Selanjutnya secara bersama mengajak anak untuk membuat langkah ke depan sesuai harapan dan keinginan disesuaikan dengan keadaan saat ini.

Banyak pelajaran berharga dapat dipetik dari rapor, baik bersifat positif ataupun negatif. Bagi yang sudah berhasil tentulah tinggal meningkatkan dan melanjutkan kebiasaan baik yang sudah dilakukan agar hasil selanjutnya menjadi lebih baik. Sebaliknya, bagi yang belum berhasil meraih yang diharapkan, perolehan nilai rapor merupakan cambuk dan peringatan berharga, agar kebiasaan yang kurang tepat dan salah harus segera diubah dengan yang lebih tepat dan benar dengan penuh kesadaran.

Tidak cepat puas dan tetap rendah hati serta tidak bersikap jumawa mesti ditanamkan oleh para orangtua, guru dan wali kelas pada siswa yang sudah baik. Jika sebaliknya, diperlukan kesadaran bersama akan pentingnya sebuah treatment 'dengan hati' baik oleh guru, wali kelas maupun orangtua agar anak tidak semakin frustrasi dan tetap termotivasi untuk menjadi lebih baik. □

Nurlaila Mahmudah, Guru Matematika SMKN 3 Yogya.

Pandemi dan Momentum Kembali Bersepeda

BEBERAPA saat yang lalu muncul pernyataan tegas *Ngarsa Dalem* selaku Gubernur DIY yang membuat kaget warga Yogyakarta. Bagaimana tidak? Beliau mengancam akan menutup Malioboro bila masih ada kerumunan tanpa mengindahkan protokol kesehatan masa pandemi Covid-19. Pemandangan yang langsung disaksikan Sri Sultan merupakan pemandangan memprihatinkan.

Dalam masa pandemik Covid-19 sekarang ini, kita secara sadar atau tidak sesungguhnya dapat menjadi ancaman bagi orang lain ketika berada di ruang publik. Kita dapat menjadi *silent carrier* yang berpotensi membawa virus Corona dan memaparkannya ke orang lain. Begitu pun sebaliknya. Jika kita memahami dengan sungguh-sungguh, maka di saat kita berada di luar kita harus betul-betul menjaga dan mematuhi protokol kesehatan agar supaya kita bisa saling menjaga dan terhindar dari ancaman paparan Covid-19.

Anjuran WHO

Peristiwa kerumunan pesepeda di kawasan Tugu - Malioboro beberapa minggu yang lalu, bisa diidentifikasi akar masalahnya. Pertama, aksi ramainya warga Yogyakarta yang bersepeda di sekitar kawasan Tugu dan Malioboro dipicu anjuran Badan Kesehatan Dunia atau WHO untuk bersepeda (dan berjalan kaki) selama masa pandemik Covid-19 ini dalam rangka menghindari kontak fisik serta memperlambat penyebaran virus. Esensi dari anjuran WHO tersebut sesungguhnya adalah upaya untuk memutus rantai penyebaran virus melalui jaga jarak antarindividu. Sepeda dipilih sebagai sarana transportasi yang paling aman dibandingkan apabila kendaraan bermotor atau angkutan umum di wilayah perkotaan yang seringkali harus berdesak-desakan. Anjuran WHO untuk bersepeda direspons warga masyarakat

Joewono Soemardjito

Yogyakarta dengan sangat antusias.

Kedua, penulis memprediksi aksi turun ke jalan ramai-ramai menggunakan sepeda adalah luapan ekspresi dan hasrat warga masyarakat Yogyakarta yang sudah terlalu rindu untuk dapat menikmati suasana Kota Yogyakarta. Mereka sudah melewatkan berbulan-bulan tinggal di rumah masing-masing dalam rangka menaati anjuran Pemerintah untuk tetap *stay at home* dan *work from home*. Jadi, bukan suatu hal yang luar biasa. Hanya, dalam suasana pandemi, hal tersebut justru sangat kontradiktif dengan upaya pemerintah yang sedang berusaha keras memutus rantai penyebaran virus corona.

Ketiga, bermunculannya hobi baru masyarakat untuk bersepeda sebagai sarana olah raga dan sekaligus bertamasya. Ramainya warga masyarakat menggunakan sepeda sempat mengundang perhatian para penghobi atau penggemar sepeda yang merasa lebih dulu dan sudah cukup lama malang melintang dalam dunia persepedaan. Aksi kerumunan sepeda ditanggapi dengan beragam respons yang terkecualan agak meremehkan, di antaranya adalah memberikan cap atau label sebagai 'ngepit anyaran'.

Pelajaran

Dari peristiwa ini ada banyak hal yang dapat kita petik sebagai pelajaran sekaligus pembelajaran bagi kita semua. Pertama, kegiatan warga masyarakat untuk bersepeda hen-

daknya bukan bersifat euforia semata, namun perlu dipertahankan sebagai sebuah kegiatan yang bermanfaat. Aktivitas bersepeda dapat menjadi virus baru bagi masyarakat yang tidak kalah dahsyatnya dengan virus Corona.

Kedua, selama masa pandemi, aksi kerumunan dalam jumlah massal tanpa mengindahkan protokol kesehatan seharusnya tidak terulang. Dan dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat Yogyakarta akan pentingnya saling menjaga kesehatan. Bersepeda secara berkelompok bukan hal yang salah. Namun harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Tentu dan tetap memperhatikan keselamatan dan mematuhi peraturan lalu lintas selama di jalan raya. Dengan bersepeda, warga Yogyakarta tetap terjaga kesehatannya dan membantu usaha Pemerintah melawan virus Corona. □

**) Joewono Soemardjito, Peneliti pada Pusat Studi Transportasi dan Logistik UGM dan Pendiri Komunitas Sepeda 'Jogja Happy Bikers'*

Pojok KR

Tanggap Darurat Covid-19 di DIY diperpanjang lagi hingga 31 Juli 2020.
-- Diperpanjang lagi?

Pembukaan destinasi wisata Kota Yogyakarta masih menunggu hasil simulasi.
- Kapan...?

Pemkab Kulonprogo tuntaskan ganti rugi lahan untuk pembangunan KA Bandara.
- Harus tuntas!

Berabe

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurija Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSoS.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfi MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Waid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawati, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Drs Sihono HT, Agung Purwandono. **Fotografer:** Efly Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting) **Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankr@yahoo.com, iklankr13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 65.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarua...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm . Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300% dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margu Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Perعتakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggung-jawab perعتakan **Alamat Homepage:** <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.044.0854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro: **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja. **Wartawan:** H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifulhul Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Samarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP. **Banyumas:** Jalan Prof Moh Yamin No 5, Purwokerto, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujianto SPd. Kepala Biro : Driyanto. **Klaten:** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti. **Magelang:** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha. **Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani. **Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.